

PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN BERORIENTASI PENGEMBANGAN WILAYAH DENGAN KUALITAS GLOBAL

Oleh: Sumarno¹

Pusat Studi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Pendahuluan

Tahun 2001 ini ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar yakni secara yuridis formal sudah diberlakukan UU no 22 tahun 1999 dan PP no 25 tahun 2000 yang mengatur otonomi daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya akan melaksanakan amanat undang-undang otonomi daerah; yang artinya adalah bahwa di samping sejumlah urusan yang sudah lama menjadi urusan daerah, akan lebih banyak lagi urusan baru. Semua urusan tersebut harus dapat dikerjakan dan dipertanggung-jawabkan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu urusan daerah yang baru adalah bidang pendidikan dan kebudayaan; kalau semula pemerintah daerah hanya bertanggung jawab atas sumberdaya manusia untuk pendidikan sekolah dasar, dan itupun menjadi urusan Dinas P dan P tingkat propinsi. Perubahan yang dikehendaki oleh UU no 22 tahun 1999, urusan tersebut bukan saja diturunkan sehingga berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; akan tetapi cakupannya diperluas ke urusan pendidikan dasar dan menengah; bukan saja urusan personel akan tetapi juga urusan penyelenggaraan program pendidikannya. Dengan perubahan besar tersebut tantangannya sangat jelas berskala besar yakni bahwa daerah belum tentu sudah

¹ Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

memiliki kapasitas dan apalagi pengalaman pengurusan berbagai aspek pendidikan; dan dalam waktu bersamaan pergaulan antar bangsa dalam era globalisasi ini akan menuntut kualitas pendidikan dengan standar global meski dalam implementasinya harus kontekstual. Mutu pendidikan tidak cukup hanya dengan jaminan status kepemilikan dan penyanggah sumber dana; akan tetapi lebih pada kinerja atau performa pendidikan pada; a) level proses instruksional, b) level manajemen institusional, dan c) level sistem pada tingkat lokal serta nasional. Proses instruksional yang efektif, institusi yang mandiri sebagai basis manajemen pendidikan; dan sistem yang menjamin aksesibilitas pendidikan bagi seluruh masyarakat; merupakan contoh performa pada berbagai level tersebut.

Performa ini harus terukur, oleh karena kalau tidak akan menyulitkan para stakeholder untuk mengetahui apakah pendidikan mengalami stagnasi, kemunduran, atau kemajuan; dan juga pendidikan perlu diketahui posisinya relatif terhadap pendidikan di negara lain terutama di negara maju. Dengan berbagai indikator, posisi Indonesia tahun 2000 lebih jelek dibandingkan dengan tahun sebelumnya; artinya mungkin kita mengalami kemunduran, atau negara lain berkembang lebih cepat, atau keduanya terjadi.

Pada dasarnya arah kebijakan pemberdayaan pendidikan adalah untuk meningkatkan kinerja pendidikan dalam lingkungan konstelasi sistem kemasyarakatan yang secara bertahap tetapi pasti semakin berbeda dengan kondisi masa lampau; menuju ke masyarakat yang lebih demokratis, terikat oleh kesepakatan internasional dalam konteks globalisasi yang menuntut keterbukaan dan berpacu dalam prestasi.

Dengan bertitik tolak pada tugas utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, berikut ini diidentifikasi sejumlah isu dan tantangan aktual pendidikan.

Identifikasi Isu dan Tantangan Pendidikan

Identifikasi ini didasarkan pada asumsi: Pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk membangun pendidikan di daerahnya; artinya dalam konteks otonomi daerah pendidikan harus dapat mencermati kemauan semua *stake holder* lokal, di samping tetap harus mempertimbangkan kepentingan nasional, dan arah kecenderungan internasional.

Terjadinya pergeseran paradigma pendidikan menuju ke pendidikan yang lebih demokratis dan tetap mengutamakan mutu; artinya pendidikan mendatang harus menjamin peningkatan aksesibilitas pendidikan oleh semua warga masyarakat yang membutuhkannya, penyempitan disparitas pendidikan, dan ada sistem jaminan mutu yang efektif.

Pendidikan harus mampu menjalin hubungan dialektis dengan lingkungan yang berdimensi plural; terutama dimensi politik dengan demokratisasinya, dimensi ekonomi dengan liberalisasinya, dan dimensi kultural dengan semakin gencarnya pengaruh eksternal nilai-nilai universal dan kondisi internal yang multikultural.

Dengan bergesernya manajemen pendidikan sehingga menjadi lebih banyak urusan daerah dalam pendidikan, terdapat sejumlah *stake-holders* dan *customers* yang perlu diperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan kemauannya oleh pendidikan.

1. Masyarakat

Pendidikan adalah kebutuhan masyarakat akan tetapi masyarakat tidak begitu saja memiliki kesadaran, kemauan, dan komitmen tinggi terhadap pendidikan. Oleh karena itu pendidikan bukan hanya harus dapat menangkap keinginan (*demand*), akan tetapi juga harus dapat mengenali kebutuhan (*needs*)

pendidikan masyarakat sehingga dapat disediakan pendidikan yang mencerdaskan, bukan pembodohan.

2. Sektor swasta dan bisnis

Dukungan dunia usaha dan industri sangat diperlukan oleh pendidikan; namun pendidikan harus dapat meyakinkan bahwa yang akan terjadi adalah hubungan yang saling menguntungkan antara pendidikan dengan dunia usaha, industri dan sektor swasta pada umumnya.

3. Pemerintah

Pengertian pemerintah mencakup pemerintah pusat dan daerah yang di dalamnya terdiri atas unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah daerah yang mengakar pada masyarakat di daerahnya, tidak dapat diingkari perannya sebagai representasi pemerintah pusat. Oleh karena itu komitmen dan kapabilitas pemerintah daerah dalam pendidikan sangat mewarnai penyelenggaraan pendidikan di daerah.

4. Pasar

Hukum pasar akan berlaku dalam dunia pendidikan, hanya pendidikan yang mampu melakukan penyesuaian yang tepat akan tetap mendapatkan kepercayaan masyarakatnya; dan sebaliknya pendidikan yang tidak tanggap kebutuhan masyarakat akan tidak dikenal, tidak mendapatkan pengakuan, dan akhirnya akan ditinggalkan.

5. Struktur kelembagaan dan unsur internal pendidikan itu sendiri

Pendidikan bermain dalam sistem, oleh karenanya memerlukan kerja keras sehingga terjadi saling keterkaitan sinergis antar komponen kelembagaan dalam sistem, dan juga dengan lingkungannya. Unsur internal meliputi siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya termasuk pustakawan, dan karyawan tata usaha.

Tabel berikut menggambarkan dan memetakan isu dan tantangan dari perspektif politik, ekonomi/finansial, dan kultural dari masing-masing kelompok *stake holder*.

Tabel 1. Identifikasi isu dan tantangan pendidikan

STAKE HOLDERS	ASPECTS		
	POLITICAL	FINANCIAL	CULTURAL
COMMUNITY	Awareness of comm rights and duties BP3 roles	Capacity Management	<u>Values:</u> Quality; human rights Democracy <u>Institutions:</u> Family; Comm org/ NGO
PRIVATE & BUSINESS	Commitment to education Regulation	Allocation Involvement	Human aspects Commitment to social environments
GOVERNMENTS: LEGISLATIVE/ EXECUTIVE LOCAL/ CENTRAL	1. Commitment/ regulations 2. Power sharing	1. Ed budget 2. Finance sharing	1. Support 2. Controll sharing
EDUCATION INSTITUTIONS • Schools • Hihger Ed • Out Of School • Comm Ed	Empowerment of 1. Legal aspects 2. Organization 3. Management 4. Quality 5. Equality	1. Income generating 2. Optimaliza tion of financial resources	1. Reinforce-ment of TQM 2. Democratic climate 3. Learning culture
MARKETS : • LOCAL • NATIONA L • GLOBAL	Act locally Commitment to national interest. Think globally	1. Subzidy 2. Incentive system	1. Merit system 2. Fairness 3. Justice

Sumber: Sumarno (2000a)

Isu dan tantangan tersebut lebih terasa di daerah sehingga sangat mutlak memerlukan perhatian dan pemecahan oleh daerah sesuai dengan proporsinya dalam era otonomi daerah yang sudah mulai dilaksanakan.

Isu yang melekat pada masyarakat di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, kadang-kadang lebih sadar haknya, atau lebih sadar kewajibannya seperti pada kelompok yang kurang terdidik.
2. Peran masyarakat yang benar dan optimal dalam penyelenggaraan pendidikan, melalui wadah yang ada seperti BP3, Majelis Pendidikan Kejuruan, atau yang masih perlu dibentuk seperti Dewan Sekolah, Komite Sekolah.
3. Kapasitas masyarakat secara ekonomik-finansial untuk membiayai pendidikannya; dan sejalan dengan itu isu lainnya adalah manajemen sumber pembiayaan dari masyarakat.
4. Secara sosial-kultural masyarakat pada umumnya masih memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai mutu pendidikan, hak azasi manusia, bhineka tunggal ika, demokrasi, dan sejumlah konsep lain yang semua itu sangat besar perannya dalam menentukan perilaku masyarakat dalam pendidikan.
5. Secara kelembagaan kemasyarakatan (*societal organization*) misalnya keluarga, organisasi kemasyarakatan di berbagai bidang juga masih terbatas kapasitasnya sebagai bentuk modal sosial yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat yang sudah mapan tatanan sosialnya.
6. Sektor bisnis dan swasta masih diragukan komitmennya terhadap dunia pendidikan, sebagian karena belum kuatnya regulasi yang ada; hal itu tercermin dari terbatasnya alokasi sumberdaya dan peranserta mereka dalam mendukung pendidikan. Dapat terjadi memang aspek manusia dalam dunia bisnis tersebut yang belum cukup wawasan tentang hubungan pendidikan dengan dunia bisnis; sehingga secara perorangan

ataupun kelembagaan juga kurang peduli terhadap lingkungan termasuk terhadap pendidikan yang ada di dalamnya.

7. Pada jajaran pemerintah isu atau permasalahannya adalah masih belum selesainya tarik-menarik mengenai berbagai hal dari pendidikan antara pusat dan daerah, antara sektor pendidikan dengan non-pendidikan. Di antaranya adalah mengenai: rekrutmen dan pembinaan karir guru, alokasi anggaran belanja untuk pendidikan, serta belum hidupnya budaya organisasi pemerintahan yang lebih menampilkan orientasi pelayanan dan mementingkan kepentingan rakyat secara nyata. Badan legislatif masih belum cukup wawasannya mengenai pendidikan, sementara eksekutifnya mengalami kendala tambahan yang bersumber pada terbatasnya legislasi yang diperlukan untuk mendukung pendidikan.
8. Permasalahan pada level institusi pendidikan sekolah-luar sekolah, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan tinggi juga sangat kompleks dan beragam. Permasalahan umumnya adalah kemampuan menghasilkan dana dan pendayagunaan dana secara optimal; budaya belajar yang mengutamakan mutu; dan penerapan makna iklim demokrasi yang tidak selalu tepat. Perluasan daya tampung untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, dan peningkatan angka pencapaian pendidikan nasional dan daerah, merupakan permasalahan lain yang dihadapi lembaga pendidikan yang ada dewasa ini.
9. Kalau dikaitkan dengan sistem pasar kerja, nampak bahwa pendidikan yang diselenggarakan swasta sudah lebih lincah meskipun kadang mengkhawatirkan dari segi mutu. Sementara itu pendidikan yang

diselenggarakan oleh pemerintah memiliki kebergantungan sangat tinggi pada sumber pemerintah sehingga dapat terkesan kurang lincah dan atau terhambat oleh birokrasi.

Kesembilan kelompok isu dan tantangan tersebut merepresentasikan sasaran kebijakan yang bertujuan memberdayakan pendidikan seutuhnya, tidak hanya bersifat parsialistik.

Kebijakan Pemberdayaan

Sasaran kebijakan pemberdayaan pendidikan adalah meningkatkan daya saing (*competitiveness*) pendidikan agar supaya dapat direalisasikan pendidikan yang berorientasi pengembangan wilayah dengan kualitas tinggi sehingga tamatannya mampu berperanserta tidak hanya dalam lingkup lokal. Dalam bagian berikut ditampilkan empat kelompok kebijakan yang dipandang paling strategis di antara sejumlah ide kebijakan lainnya untuk memberdayakan pendidikan. Kebijakan otonomi pendidikan merupakan salah satunya; dan tiga kebijakan lain sebenarnya melekat dengan atau sangat diperlukan dalam rangka pemberdayaan otonomi pendidikan.

Tabel 2. Kebijakan pemberdayaan pendidikan dalam otonomi daerah

ASPEK LINGKUNGAN	KEBIJAKAN			
	MUTU & RELEVANSI PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	OTONOMI PENDIDIKAN	MANAJEMEN BERBASIS MASY
DEMOKRATI-SASI POL.	PENDIDIKAN DEMOKRASI	PERLUASAN PEMERATAAN	DESENTRALISASI	PENDIDIKAN UTK SEMUA

LIBERALISASI EK.	PROGRAM UNGGULAN	KOMPETENSI DASAR	AKUNTABILITAS	AKSI AFIRMATIF
UNIVERSALISASI KULTURAL	<ul style="list-style-type: none"> • JATI DIRI • BUDAYA MUTU 	BUDAYA BELAJAR	BUDAYA DESENTRALISASI	<ul style="list-style-type: none"> • MODAL-SOSIAL • PROSES KEBUD
INSTRUMEN MANAJEMEN	TQM	WAJIB BELAJAR	<ul style="list-style-type: none"> • PP 25/2000 • APBD • MBS & M 	<ul style="list-style-type: none"> • SENTRA EDUKASI • S.I.M.

Sumber: Sumarno (2000b)

Berdasarkan matriks tersebut berikut disajikan secara ringkas sejumlah rekomendasi kebijakan untuk memberdayakan sektor pendidikan.

Kebijakan mengenai mutu dan relevansi pendidikan:

1. Penetapan ukuran mengenai mutu atas berbagai aspek seperti ulusan, unit pelaksana teknis pendidikan, dan tenaga kependidikan. Penerapan standard mutu ini dilakukan secara bertahap atau dengan sistem prioritas sesuai dengan kemampuan daerah. Termasuk dalam arah kebijakan ini adalah untuk mendorong hidupnya pendidikan yang tidak hanya berorientasi NEM, tidak hanya mementingkan kemampuan kognitif akademik, akan tetapi menyiapkan peserta didik sebagai manusia seutuhnya.
2. Pemberian kesempatan dan dorongan tumbuhnya unggulan daerah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengupayakan relevansi optimal antara kondisi daerah atau wilayah yang dilayani dengan substansi yang dikembangkan oleh sistem pendidikan di daerah terkait. Implisit di dalam konsep ini adalah bahwa tidak harus semua pendidikan berorientasi kebutuhan lokal, akan tetapi dibutuhkan pula jenis atau jenjang pendidikan tertentu yang dirancang untuk mensuplai wilayah

tertentu yang mencakup beberapa daerah. Misalnya untuk pendidikan teknisi penerbangan meskipun terletak di Yogyakarta, harus direncanakan berdasar kebutuhan tenaga teknisi penerbangan di tingkat nasional, atau bahkan regional. Sebaliknya kalau Sleman mengembangkan bisnis dan wisata agro harus memiliki sekolah yang mendukung pengembangan bidang tersebut.

3. Pembuatan dan pensosialisasian sistem informasi mutu pendidikan. Dewasa ini masyarakat sulit memperoleh informasi yang lengkap, memadai dan dapat dipercaya pada waktu dibutuhkan untuk membuat keputusan mengenai: kelanjutan studi, kerjasama kelembagaan, pendirian program studi baru, peningkatan mutu program studi yang sudah ada. Akibatnya adalah bahwa keputusan perencanaan hanya berdasarkan data seadanya, perkiraan yang sangat riskan dengan kesesatan, atau semata berdasarkan pertimbangan yang sangat dangkal.
4. Penegakan jati diri bangsa, dan menumbuhkan budaya mutu. Pengaruh teknologi informasi demikian besarnya dalam membawa masuk nilai-nilai budaya universal yang cenderung mengarah pada budaya populer. Untuk menghadapi arus informasi ini diperlukan kebijakan yang menghasilkan kemampuan untuk memilih, menyaring nilai-nilai yang baik, tidak merugikan, cocok dengan nilai jati diri bangsa. Dengan demikian karakter bangsa akan terjaga dan berkembang dengan baik dalam masyarakat internasional. Kesadaran akan mutu menjadi bagian melekat dari orientasi nilai tersebut. Peningkatan mutu tidak cukup direkayasa dengan berbagai prosedur dan standarisasi, akan tetapi harus diupayakan pula sebagai nilai intrinsik yang

mewarnai setiap perbuatan, dan harus dimulai dari dalam bidang pendidikan.

5. Perlu penerapan yang efektif manajemen mutu (TQM) dalam pendidikan. Manajemen mutu perlu diterapkan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Pengendalian mutu tidak cukup terhadap produk atau hanya pada waktu anak akan mengakhiri suatu jenjang atau program pendidikan; akan tetapi pengendalian mutu tersebut harus secara total terhadap komponen kunci dari input dan proses pelaksanaan pendidikan. Akreditasi program dan sertifikasi kompetensi profesi adalah contoh kebijakan pengendalian mutu pada waktu iklim kompetisi semakin ketat, sumberdaya terbatas, masyarakat membutuhkan perlindungan dan jaminan dalam pembuatan keputusan pendidikan untuk dirinya, anaknya, atau untuk usahanya.

Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan Dasar:

Pengoptimalan peran pendidikan dasar dalam situasi krisis multidimensi berkepanjangan Termasuk di dalam kelompok kebijakan ini adalah kebijakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, pencegahan putus sekolah, dan pemberian kesempatan alternatif bagi mereka yang sudah di luar kelompok usia pendidikan dasar.

1. Pengembangan kemampuan kelembagaan pendidikan dasar dalam:
 - a. membangun kemampuan dasar literasi dan kepribadian
 - b. menyelenggarakan program penyetaraan
 - c. membiayai program
 - d. menjalin kerjasama dengan masyarakat dan lembaga lain

2. Penumbuhan semangat dan iklim belajar sepanjang hayat dan *learning community*. Prinsip pendidikan sepanjang hayat semakin relevan dengan perkembangan masyarakat, apabila masyarakat belum menghayati budaya belajar, maka akan banyak mengalami ketertinggalan dan kesulitan dalam era informasi ini.
3. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Meskipun untuk beberapa daerah tertentu angka partisipasi pendidikan dasar sudah di atas 85 %, kiranya masih lebih banyak daerah lain yang masih harus memperjuangkan masyarakatnya sehingga minimal mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun. Berbagai program alternatif perlu dibuat sehingga masyarakat secara lebih fleksibel dapat memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kondisi kehidupan mereka.

Kebijakan pemberdayaan daerah untuk otonomi dalam bidang pendidikan

1. Peningkatan kemampuan kelembagaan dalam urusan pendidikan di daerah. *Institutional capacity building* merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. Sering terjadi suatu institusi atau suatu daerah memiliki orang yang berkemampuan tinggi dan kinerja yang baik, akan tetapi kinerja sebagai institusi tidak terlalu banyak berubah. Dengan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja institusional atau organisasional. Hal ini menjadi lebih jelas pada waktu lahirnya dinas atau kantor baru di daerah, baik fungsi baru ataupun hasil penggabungan dari dua atau lebih unit kerja sebelumnya. Demikian pula lembaga legislatif daerah juga tidak dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk dapat mengurus dengan baik sektor pendidikan; oleh karena itu

juga diperlukan pemberdayaan secara terencana, sehingga dapat terjadi akselerasi kapasitas secara signifikan.

2. Penegakan prinsip akuntabilitas, oleh karena pendidikan bukan saja untuk masyarakat tetapi juga menggunakan dana masyarakat. Otonomi harus disertai dengan penerapan akuntabilitas, tanpa itu mengandung resiko dapat terjadi penyalah-gunaan atau penggunaan kewenangan secara kurang tepat. Setiap penggunaan sumberdaya masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundangan, mutlak perlu diikuti dengan pertanggung jawaban. Sekolah maupun dinas pendidikan membutuhkan media untuk dapat dan perlu mempertanggung jawabkan peran dan kewenangan yang dipercayakan kepadanya.
3. Peningkatan orientasi nilai budaya yang cocok untuk hidupnya sistem desentralistis. Perubahakan struktur kelembagaan tidak dengan sendirinya akan diikuti dengan orientasi nilai kerja yang cocok dengan struktur baru. Budaya kerja dari tatanan sentralistis yang kuat dan lama, membutuhkan upaya sungguh-sungguh untuk dapat berubah sehingga hidup dan tumbuh budaya kerja yang cocok dengan sistem yang desentralistis misalnya: budaya menunggu perintah, petunjuk, dan pengarahan diubah menjadi budaya inisiatif, kreatif, dan produktif.
4. Pemberian landasan kekuatan yuridis pada berbagai aspek pengurusan pendidikan di daerah misalnya: alokasi anggaran biaya pendidikan dari APBD dan APBN; kewajiban industri dan sektor swasta untuk mendukung sektor pendidikan. Landasan yuridis akan menjadi salah satu jaminan keberlanjutan dari setiap kebijakan

karena akan dengan sendirinya menjadi dasar komitmen kelembagaan, bukan hanya komitmen personal pejabat yang terbatas masa tugasnya. Lembaga pendidikanpun memerlukan upaya sehingga memahami hukum, dan bergerak dalam koridor hukum.

Kebijakan mengenai manajemen berbasis masyarakat:

1. Pensosialisasian pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan. UNESCO menawarkan konsep pendidikan untuk semua dan konsep tersebut disempurnakan dengan tambahan bahwa juga diperlukan komitmen semua pihak terhadap pendidikan. Masyarakat hanya akan peduli pendidikan kalau pendidikan menjanjikan manfaat bagi masyarakatnya. Oleh karena itu diperlukan komunikasi timbal balik antara pendidikan dan masyarakatnya.
2. Bantuan afirmatif untuk anak yang mengalami kesulitan ekonomi atau yang dalam kondisi kurang beruntung (*disadvantaged*). Kebijakan ini bersifat santunan sementara, sehingga bersifat mendidik, dan harus dihindari tumbuhnya eksekse kebergantungan. Pemberian pembebasan SPP hanya diberikan apabila memang masih membutuhkan keringan dari beban pembiayaan pendidikan.
3. Pembentukan modal sosial pendukung pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat dan dari masyarakat serta dengan peranserta masyarakat. Model hubungan kerjasama ini membutuhkan infrastruktur sosial yang mampu mendukung berjalannya fungsi yang diharapkan secara berkelanjutan. Dapat diambil sebagai

contoh adalah pembentukan wadah kerjasama (misal: forum), penumbuhan tata nilai kebersamaan, pembuatan sistem insentif yang menarik, mendorong, dan merangsang peranserta berbagai komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

4. Pembuatan fungsi penelitian dan pengembangan pendidikan di daerah dengan sistem informasi yang memadai. Pengembangan pendidikan harus secara profesional dan menggunakan prosedur ilmiah, untuk itu perlu dihidupkan fungsi penelitian dan pengembangan pendidikan di daerah. Fungsi ini dapat dilekatkan dengan pada unit organisasi yang ada, dan perlu menjalin hubungan kerjasama yang efektif dengan perguruan tinggi atau badan lain yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan pendidikan.

Catatan Penutup

Berikut dua catatan penutup yang dipandang sangat esensial dalam perumusan kebijakan pemberdayaan pendidikan dalam semangat otonomi daerah.

1. Keberhasilan otonomi pendidikan tidak lepas dari peranan:
 - a. Karakteristik, minat dan kepentingan *stake holder* pendidikan di daerah.
 - b. Pemberdayaan masyarakat secara simultan dan saling komplementatif dengan pemberdayaan pendidikan.

2. Kebijakan pemberdayaan pendidikan harus berpijak pada kenyataan heterogenitas multidimensi dari masyarakatnya; keberhasilan tidak identik dengan menuntut keseragaman.

Referensi

- Fiske, E.B. (1996) *Decentralization of education: Politic and consensus*. The World Bank.
- PP no. 25 th. 2000
- Sumarno (2000a) *Kebijakan pendidikan nasional dalam menghadapi tantangan global*. Paper pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia IV, Jakarta 19-22 Nop 2000.
- (2000b) *Multidimensional aspects of community based education in Yogyakarta* Paper pada diskusi di WSPK Lembaga Penelitian UNY dengan tamu Denmark 4 Nop 2000
- (2000c) *Kebijakan otonomi pendidikan menyongsong otonomi daerah*. Paper disampaikan dan didiskusikan pada Seminar Pendidikan se-DIY dan Jawa Tengah diselenggarakan oleh BEM-FKIP Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta, 13 Nopember 2000
- (2000d) *Peranan pemerintah dalam otonomi pendidikan*. Paper seminar di STAIN Purwokerto, 27 Mei 2000.
- UU no 22 th 1999
- UU no 25 th 1999